BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk sebagai perusahaan yang telah tercatat di bursa saham dalam negeri dan luar negeri berkomitmen penuh untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan serta praktek tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance*[1] yang sesuai dengan standard pasar modal dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas perusahaan. Pelaksanaan komitmen tersebut telah dibangun dengan pembenahan internal dan pemenuhan standard internasional.

Standard internasional khususnya aturan yang ditetapkan oleh *US Securities and Exchange Commission* (US SEC) yang harus diadopsi oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, sebagai salah satu perusahaan yang telah *listing* di New York Stock Exchange, adalah ***Sarbanes Oxley Act*** (**SOA**). Aturan ini diprakarsai oleh dua senator Amerika, Paul S. Sarbanes dan Michael G. Oxley, setelah adanya kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan besar di Amerika, seperti: Enron, Global Crossing Ltd., WorldCom, dan Adhelpia Communication Corporation, yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pasar modal dunia.

Berkat tekanan pers dan demi kepentingan bisnis di Amerika, US SEC segera menyusun suatu Rancangan Undang-Undang yang diprakarsai oleh Paul S. Sarbanes dan Michael G. Oxley. Rancangan Undang-Undang tersebut kemudian disetujui oleh Senat dan disahkan menjadi Undang-Undang oleh Presiden Bush pada tanggal 30 Juli 2002. Sebagai penghormatan kepada pemrakarsa rancangan, Undang-Undang tersebut dinamakan ***Sarbanes Oxley Act***.

Sarbanes Oxley Act (***SOA***) bertujuan untuk mencegah terulangnya kembali kasus manipulasi laporan keuangan dan membangun kepercayaan publik melalui transparansi keuangan dan pengurangan penyimpangan, sehingga diharapkan dapat memperbaiki praktek *Good Corporate Governance*. Sistem pengendalian internal yang tercantum dalam *Sarbanes Oxley Act* merupakan unsur penting dalam praktek *Good Corporate Governance*. Terdapat tiga section ***Sarbanes Oxley Act (SOA)*** yang saat ini diadopsi oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, yaitu:

- Section 302 (*Disclosure Controls and Procedures*)

  CEO dan CFO wajib melakukan sertifikasi laporan keuangan triwulan, kelengkapan dan keakuratan laporan kepada US SEC, dan sertifikasi terhadap efektivitas internal kontrol.

[1] Good Corporate Governance is the system by wich business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among participants in the corporation and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs.
(Organization of Economic Co-operation and Development, 1999)

- Section 404 (*Internal Control Attest*)

  adanya tanggung jawab dan atestasi manajemen terhadap *internal control over financial reporting* dan atestasi auditor disertai evaluasi atas laporan manajemen.
- Section 906 (*Civil Certification by CEO/CFO*)

  CEO dan CFO wajib melakukan sertifikasi bahwa laporan periodik "*fully complies*" peraturan yang dikeluarkan oleh US SEC, dan informasi yang terkandung di dalam laporan periodik tersebut disajikan secara wajar, dalam keseluruhan hal yang material, terhadap kondisi dan hasil operasi perusahaan. Section ini juga berisi sanksi atau hukuman atas penyimpangan section 906.

Gambar 1.1 Hubungan antara Section 302 dan 404

Secara khusus, SOA section 404 berisi aturan yang mewajibkan perusahaan yang telah *listing* di NYSE untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil evaluasi pengendalian internal yang dilakukan oleh auditor eksternal dalam kewajaran penyajian laporan keuangan sehingga dapat menjamin integritas antara aktivitas perusahaan dengan laporan keuangan perusahaan.

Di bawah pengawasan dan peran manajemen perusahaan, termasuk Direktur Utama dan Direktur Keuangan Perusahaan, serta dibantu adanya konsultan,

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk melaporkan dalam Form 20-F tahun 2006 bahwa berkaitan dengan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan prosedur pengungkapan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006, dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam *Internal Control Integrated Framework* yang diterbitkan oleh *The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO),* menghasilkan keputusan manajemen bahwa pengendalian dan prosedur pengungkapan perusahaan tidak efektif. Hal ini sebagai akibat adanya *material weaknesses*.

Terdapat empat *material weaknesses* berkaitan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang ditemukan pada audit terintegrasi pada tahun 2006, yaitu:

1) Perusahaan tidak memiliki lingkungan pengendalian (*control environment*) yang efektif berdasarkan criteria yang ditetapkan oleh COSO.

2) Perusahaan tidak melaksanakan pengendalian yang efektif, termasuk pengawasan terhadap proses tutup buku dan pelaporan keuangan. Perusahaan tidak melakukan pengendalian yang efektif terhadap:
   - kelengkapan dan akurasi proses konsolidasi dan pengungkapan keuangan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pengungkapan aktiva tetap dan akuntansi penggabungan usaha
   - pengendalian-pengendalian yang terkait dengan akurasi penyusunan laporan keuangan dan pengungkapan atas laporan arus kas konsolidasi, informasi segmen, dan akuisisi atas suatu kerjasama operasi
3) Perusahaan tidak merancang dan melaksanakan pengendalian yang efektif secara memadai atas akuntansi aktiva tetap, untuk memastikan kelengkapan, akurasi, dan penilaian aktiva tetap, termasuk penambahan atau penghentian pemakaian aktiva tetap.
4) Perusahaan tidak merancang dan melaksanakan pengendalian yang efektif atas akuntansi pendapatan dan piutang usaha yang terkait, untuk memastikan kelengkapan dan akurasi pendapatan sirkit langganan dan penyisihan piutang tak tertagih serta kelengkapan dan akurasi pendapatan dan penagihan *fixed wireline* dan *fixed wireless.*

Oleh sebab itu, pengendalian internal atas pelaporan keuangan menjadi prioritas dalam pembenahan aktivitas kontrol perusahaan dan sebagai usaha untuk menjalankan pengendalian internal yang terintegrasi. Penetapan delapan siklus berdasarkan bisnis proses yang berhubungan dengan pelaporan keuangan dan akun yang signifikan merupakan salah satu usaha untuk melakukan pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

Delapan siklus yang telah dibangun oleh Unit Pengelola SOA (Proyek Integrasi *Internal Control*), antara lain:

- Siklus Pendapatan
- Siklus Beban
- Siklus Pengadaan & Aktiva tetap
- Siklus Perpajakan
- Siklus Perbendaharaan
- Siklus Persediaan
- Siklus Investasi
- Siklus Pelaporan Keuangan

Penetapan terhadap kedelapan siklus tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa proses bisnis[2] yang berhubungan dengan transaksi pada akun yang signifikan

[2] Proses bisnis dari sebuah perusahaan dapat dinyatakan sebagai sebuah kumpulan dari banyak proses dan aktivitas. (DeToro, 1996)

telah dilakukan dengan lengkap dan benar, sesuai dengan peraturan perusahaan dan telah seluruhnya dicatat serta dilengkapi dokumen dan atau catatan yang diperlukan.

Pelaksanaan pengendalian terhadap kedelapan siklus bisnis tersebut mengalami hambatan pada pelaksanaan aktivitas dan kontrol pada pengendalian internal karena kurangnya kepedulian terhadap implementasi *Sarbanes Oxley Act* section 404. Para pelaku kontrol dan pelaku aktivitas cenderung bersifat hanya menjalankan desain kontrol yang telah dirancang oleh PIIC.

Berdasarkan hasil evaluasi persiapan *Sarbanes Oxley Act* section 302 dan 404 pada tahun 2006, Divisi Regional III PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk dinyatakan belum siap, karena nilai evaluasi kurang dari 50%, yang berarti kurang dari 50% karyawan Divisi Regional III PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk peduli terhadap persiapan implementasi Sarbanes Oxley Act. Kurangnya kepedulian tersebut berkaitan dengan unsur tingkat keandalan pengendalian internal, yaitu: *control procedures*, pemahaman karyawan, sikap manajemen, *monitoring*, dan pengendalian dokumen.

Pada penelitian ini, akan dilakukan evaluasi pelaksanaan aktivitas kontrol di kantor Divisi Regional III PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Penelitian ini memfokuskan evaluasi pelaksanaan aktivitas kontrol pada siklus bisnis beban karena siklus ini berhubungan dengan transaksi beban (expenses) dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang terdapat pada seluruh unit bisnis PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, dan berpengaruh lebih dari 5% dari *Earn Before Tax* (EBT) perusahaan.

Selain itu, siklus ini juga terkait dengan material weakness pada Annual Report PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk pada tahun 2006, yang menyatakan bahwa perusahaan tidak melakukan pengendalian yang efektif terhadap arus kas konsolidasi. Tentunya, pengendalian laporan arus kas konsolidasi (pada khususnya arus kas keluar konsolidasi) tidak dapat dipisahkan dari siklus bisnis beban.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1) Apakah pengendalian aktivitas kontrol pada siklus bisnis beban dilaksanakan sesuai dengan *control design* yang telah ada di kantor Divisi Regional III PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk?
2) Apakah terdapat kelemahan terhadap pelaksanaan aktivitas kontrol sesuai dengan *control design* tersebut dan kriteria tingkat keandalan pengendalian internal?
3) Bagaimana rekomendasi terhadap pengendalian aktivitas kontrol agar dapat mencegah terjadinya kelemahan pada pelaksanaan aktivitas kontrol?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1) Mengamati pelaksanaan aktivitas kontrol pada siklus bisnis beban berdasarkan *control design* yang telah ada di kantor Divisi Regional III PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
2) Mengetahui adanya kelemahan terhadap pelaksanaan aktivitas kontrol sesuai dengan *control design* tersebut dan kriteria tingkat keandalan pengendalian internal
3) Memberikan rekomendasi terhadap pengendalian aktivitas kontrol agar dapat mencegah terjadinya kelemahan pada pelaksanaan aktivitas kontrol sehingga dapat meningkatkan pengendalian internal

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain :

1) Sebagai pendukung proses pengembangan manajemen internal control yang berorientasi pada *critical control-activities* di kantor Divisi Regional III PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
2) Dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan *Business Process Improvement* dan *Internal Control Management*.

1.5 Batasan Masalah

Ruang lingkup yang akan dibahas pada penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1) *Framework* yang digunakan sebagai kerangka evaluasi aktivitas kontrol adalah *Internal Control Integrated Framework* yang diterbitkan oleh *The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission* (COSO).
2) Pengukuran tingkat keandalan hanya dilakukan pada *transactional level control*.
3) Analisis dilakukan terhadap hasil pengolahan data yang diperoleh selama kurun waktu penelitian, sehingga bila terdapat perubahan setelah jangka waktu penelitian, tidak dimasukkan dalam analisis.